

RINGKASAN

Mili Urmila

NIM 220510045

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN USAHA PETERNAKAN YANG BEROPERASI DI TENGAH PERMUKIMAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG)

(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H., dan Tasyukur, S.H., M.H.)

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi melalui penataan ruang dan penegakan hukum yang baik. Namun, masih terdapat usaha peternakan yang beroperasi di tengah permukiman masyarakat di Kabupaten Deli Serdang sehingga menimbulkan pencemaran udara, bau tidak sedap, dan gangguan kesehatan. Kegiatan usaha peternakan sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap badan usaha yang beroperasi di tengah permukiman serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum serta kendala yang dihadapi dalam penanganan usaha peternakan yang berada di tengah permukiman di Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap badan usaha yang beroperasi di tengah permukiman dilakukan oleh DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP melalui pengawasan, pemeriksaan, teguran, dan koordinasi sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat usaha yang melanggar ketentuan tata ruang, perizinan, dan lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi meliputi lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta sistem OSS yang berorientasi administratif. Upaya yang dilakukan ialah meningkatkan pengawasan, koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi perizinan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan penerapan sanksi administratif secara tegas agar penegakan hukum terhadap badan usaha di kawasan permukiman berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Usaha Peternakan, Permukiman.

SUMMARY

Mili Urmila
NIM 220410045
***LAW ENFORCEMENT AGAINST LIVESTOCK
BUSINESS ENTITIES OPERATING IN RESIDENTIAL
AREAS (RESEARCH STUDY AT THE INVESTMENT
AND ONE-DOOR INTEGRATED SERVICES
DEPARTMENT OF DELI SERDANG REGENCY)***
**(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H., dan Tasyukur, S.H.,
M.H.)**

A healthy environment is a fundamental right of the community that must be protected through proper spatial planning and effective law enforcement. However, there are still livestock businesses operating within residential areas in Deli Serdang Regency, causing air pollution, unpleasant odors, and health disturbances. In fact, livestock business activities have been regulated under the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014.

This study aims to determine the implementation of law enforcement against business entities operating in residential areas and to identify the obstacles and efforts made in enforcing the law.

This research employed an empirical juridical method with a sociological juridical approach. Data were collected through interviews, field observations, and document studies, and then analyzed qualitatively.

Research findings indicate that law enforcement regarding business entities operating within residential areas is carried out by the DPMPSTP, the Environmental Agency, and the Public Order Agency (Satpol PP) through monitoring, inspections, issuance of warnings, and inter-agency coordination, in accordance with Article 71 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009, Article 61 of Law Number 26 of 2007. However, implementation remains suboptimal, as there are still businesses violating spatial planning, licensing, and environmental regulations. Challenges encountered include weak oversight, issues with inter-agency coordination, low legal awareness among business operators, and the administrative orientation of the OSS system. Efforts to address these issues involve enhancing monitoring, coordination, and public outreach, as well as evaluating licensing processes.

Therefore, enhanced oversight, inter-agency coordination, and the strict application of administrative sanctions are required to ensure more effective law enforcement against business entities in residential areas.

Keywords: Law Enforcement, Livestock Business, Residential Areas.